

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. KPPS memainkan peran vital dalam proses pemilu, namun kedudukan hukumnya sering kali tidak jelas, terutama dalam konteks perlindungan tenaga kerja. Kajian ini mengulas aspek-aspek hukum yang melandasi hubungan kerja antara KPPS dan KPU, termasuk jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara KPPS dan KPU umumnya bersifat kontraktual sementara (*temporary contract*), di mana KPPS dianggap sebagai pekerja kontrak yang terikat pada masa pemilu tertentu. Meskipun demikian, ada ketidakjelasan dalam penerapan beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan, terutama terkait jaminan sosial, hak atas upah, dan perlindungan saat terjadi perselisihan kerja. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan yang memastikan perlindungan hukum bagi anggota KPPS, termasuk dalam hal pemberian upah yang layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Kata Kunci : KPPS, KPU, Perjanjian Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja, Kontrak Sementara

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of the Voting Organizing Group (KPPS) in employment agreements with the General Election Commission (KPU) based on the Labor Law. KPPS plays a vital role in the election process, yet its legal standing often remains unclear, particularly in terms of labor protection. This research examines the legal aspects underpinning the employment relationship between KPPS and KPU, including the types of employment agreements, the rights and obligations of the parties involved, and the legal protections provided by the Labor Law. The study employs a normative juridical approach by reviewing various legislation, legal documents, and relevant court decisions. The results indicate that the employment relationship between KPPS and KPU is generally of a temporary contractual nature, where KPPS is considered as contract workers bound to a specific election period. However, there is ambiguity in the application of certain provisions of the Labor Law, particularly regarding social security, wage rights, and protection in the event of labor disputes. This research emphasizes the importance of strengthening regulations and policies to ensure legal protection for KPPS members, including adequate wages, health and safety guarantees, and effective dispute resolution mechanisms

Keywords : KPPS, KPU, *Employment Agreement, Labor Law, Labor Protection, Temporary Contract.*